

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini memaparkan 4 gambaran umum, yaitu gambaran umum Kota Mataram, profil KPU Kota Mataram, profil Lembaga Perasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kota Mataram dan Gambaran Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Gambaran umum Kota Mataram, mencakup sejarah Kota Mataram, Keadaan Geografis, Kependudukan serta Visi dan Misi Kota Mataram.

2.1. Gambaran Umum Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat

Sejarah tentang Kota Mataram dan secara resmi Nusa Tenggara Barat lahir menjadi salah satu daerah Swatantra Tingkat I dari pemekaran Provinsi Sunda Kecil, selain Dati 1 Bali dan Nusa Tenggara Timur. Yaitu tanggal 17 Desember 1958 ditetapkanlah Mataram sebagai pusat Pemerintahan dan sekaligus sebagai ibu kotanya. Saat itu Mataram juga menjadi ibu kota Dati II Lombok Barat. Kota Mataram menjadi ibu Kota Nusa Tenggara Barat dan Lombok Barat, terdiri dari 3 bagian kota yaitu Ampenan, Mataram, dan Cakranegara. Ampenan merupakan kota pelabuhan, kemudian Mataram menjadi pusat pemerintahan dan pendidikan, sedangkan Cakranegara sebagai pusat perdagangan dan perekonomian, Mataram sebagai ibu kota dari dua pemerintahan. Perkembangan kota semakin maju sedangkan kebutuhan sarana dan prasarana yang membuat fasilitas umum menjadi semakin besar. Kmuian, kebutuhan jaringan transportasi dan tempat pemukiman menjadi lebih luas, oleh karena itu Pemerintah Dati NTB, yang saat itu Gubernurnya dijabat oleh Kolonel Raden Wasita Kusuma, dan atas saran pertimbangan pembantu-pembantu

Gubernur, diusulkan ke pemerintah pusat. Departemen Dalam Negeri, agar Kota Mataram ditunjuk menjadi Kota Administratif yang untuk sementara waktu masih berada dalam kendali Dati II Lombok Barat (MataramKota.go.id).

Selanjutnya usulan pemda tingkat II NTB disetujui oleh Departemen Dalam Negeri, maka dilakukan persiapan-persiapan administratif untuk sementara dalam persiapan menuju Kota Administratif, ditunjukkan pejabat Sementara (PjS) Walikota Administratif Mataram, yaitu Drs Iswarto, yang pada saat itu sedang memangku jabatan sebagai Kepala Urusan Pegawai (UP) Sekretariat Daerah Nusa Tenggara. Sebagai pejabat sementara Drs Iswarto ditugaskan mengurus dan menyelesaikan proses terwujudnya Kota Administratif Mataram. Dalam tugasnya sebagai PjS Walikota Adinistratif, ia dibantu oleh seorang sekretaris Walikota yang dijabat oleh Drs. Abu Bakar Achmad, setelah kurang lebih satu tahun melaksanakan tugas sebagai PjS Walikota, keluarlah surat keputusan resmi Kota Mataram pada tanggal 29 Agustus 1978 (MataramKota.go.id).

2.2. Keadaan geografi

Secara geografis Kota Mataram terletak pada posisi 116°04'116°10' Bujur Timur dan,08°33'-08°38' lintang Selatan dengan batas-batas wilayah: Sebelah Utara Kecamatan Gunungsari, Kecamatan Batulayar dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Sebelah Timur Kecamatan Narmada dan Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat, Sebelah Selatan Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat, Sebelah Barat Selat Lombok. Kota Mataram adalah dataran dengan topografi Kota Mataram berada pada ketinggian kurang dari 50 meter di atas permukaan laut

(dpl dengan ketinggian sejauh 9 km. struktur geologi Kota Mataram sebagian besar adalah jenis tanah liat dan tanah endapan dari tuf yang merupakan endapan alluvial yang berasal dari kegiatan gunung berapi. Secara visual terlihat seperti lempengan batu pecah, sedangkan dibawahnya terdapat lapisan pasir (MataramKota.go.id).

Kota Mataram memiliki luas wilayah terkecil di Provinsi Nusa Tenggara Barat, namun dihuni oleh jumlah penduduk yang besar. Secara administrasi Kota Mataram terbagi dalam 7 Kecamatan, terdiri dari Kecamatan Ampenan, Kecamatan Sekarbela, Kecamatan Mataram, Kecamatan Selaparang, Kecamatan Cakranegara, Kecamatan Sandubaya. Nama Kecamatan dan luas Wilayah secara rinci dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 2.1. Proporsi Penyebaran Penduduk

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/ /Km ²)
1	Ampenan	91,009	9,49	9,630
2	Sekarbela	69,989	10,32	6,782
3	Mataram	87,527	10,76	8,134
4	Selaparang	75,235	10,77	6,986
5	Cakranegara	67,791	9,67	7,010
6	Sandubaya	76,868	10,32	7,448
7	Kota Mataram	468,509	61,30	7,643

Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Mataram tahun 2017

Tabel 2.2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

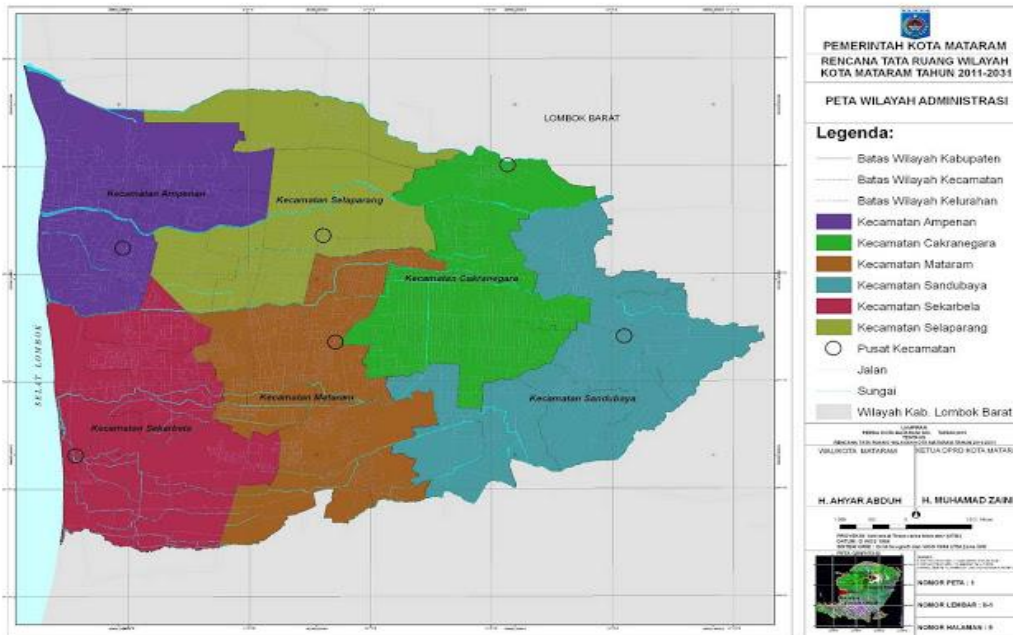
Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah jiwa
0 – 4	21,509	20,687	42,196
5-9	20,825	20,206	41,031
10-14	19,880	19,013	38,893
15-19	23,440	23,458	46,898
20-24	31,722	26,947	58,669
25-29	19,665	19,714	39,379
30-34	17,448	20,008	37,456
35-39	15,860	18,248	34,108
40-44	15,603	17,131	32,734
45-49	13,060	13,895	26,955
50-54	10,239	10,764	21,003
55-59	8,530	9,111	17,641
60-64	5,662	6,318	11,980
65-69	3,869	4,504	8,373
70-74	2,357	3,109	5,466
75+	2,128	3,599	5,727
Jumlah	231,797	236,712	468,509

Sumber:Badan Pusat Statistika Kota Matram tahun 2018

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa struktur umum penduduk Kota Mataram masih membentuk piramida yang menggambarkan jumlah penduduk yang masih berumur remaja lebih banyak dibandingkan yang berumur lebih tua. Pada

tahun 2017 penduduk Kota Mataram terdiri dari remaja (20-24) 58,669 jiwa, sedangkan yang tua (≥ 75) 5,727 jiwa. Tercatat jumlah penduduk Kota Mataram 468,509 jiwa, terdiri dari 236,721 jiwa perempuan dan 231,797 jiwa laki-laki. Dengan sifat heterogen, mayoritas penganut agama Islam dan berbagai macam bentuk pekerjaan antara lain, Pegawai Negeri Sipil, pedagang, petani, peternak, buruh dan lain-lainya.

Gambar 2.1 Gambar Peta Kota Mataram



Sumber: Badan Pusat Statistika Kota Mataram tahun 2016

Visi

Terwujudnya Kota Mataram yang Religius, Maju dan Berbudaya sebagai Pusat Pemerintahan, Perdagangan dan Jasa.

Misi

1. Mewujudkan Masyarakat yang Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi nilai Moral dan Etika.
2. Mewujudkan keberdayaan Masyarakat dalam Aspek Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan Hukum.
3. Mewujudkan SDM serta diimbangi dengan IMTAQ.
4. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah dalam Menghadapi Era Globalisasi.
5. Mewujudkan Penyelenggaraan Kememerintahan Yang Baik
6. Mewujudkan Pengelolaan Potensi dan Sumber Keungan Daerah Yang Efektif, Efisien dan Akuntabel
7. Mewujudkan Pengelolaan Potensi SDA Berdasarkan Prinsip Kelestarian Lingkungan Hidup dan Pembangunan Yang Berkelanjutan

2.3. KPU Kota Mataram

Penyelenggara Pemilu di Indonesia disebut sebagai Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) yang terdiri dari struktur pusat, provinsi dan daerah. Semua kota di Indonesia memiliki KPU masing-masing yang bekerja berdasarkan aturan dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu. Namun dalam proses pelaksanaan di lapangan, KPU setiap daerah memiliki kewenangan untuk membuat regulasi sesuai dengan kebutuhan. Begitu juga dengan KPU Kota Mataram.

KPU merupakan lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Dalam proses pelaksanaan Pemilu, KPU Kota Mataram memiliki beberapa kerangka kerja, mulai dari Visi dan Misi, Struktur organisasi, Tugas dan Fungsi serta program kerja yang menunjang terlaksananya Pemilu yang sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017. KPU Kota Mataram dalam menjalankan tugasnya, KPU Kota Mataram memiliki visi dan misi sebagai berikut:

VISI

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

MISI

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional.
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat.
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan.
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.

6. Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara pemilu.
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesable.

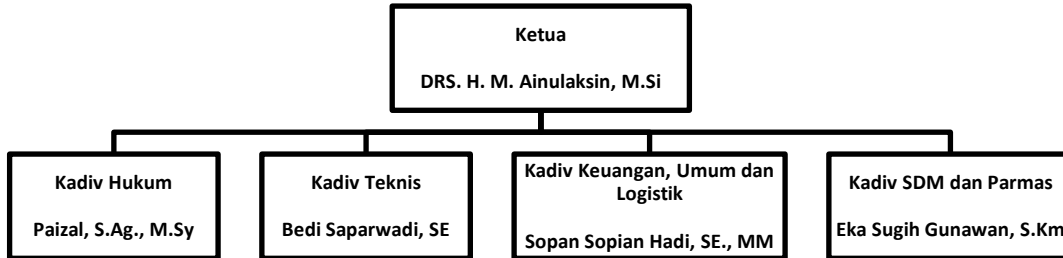
Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu.
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu.
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel dan aksesabel.

2.3.1. Struktur Organisasi Anggota KPU Kota Mataram

Bagan 2.1. Bagan Struktur Organisasi Anggota KPU Kota Mataram



Sumber: KPU Kota Mataram 2018

Dapat dilihat dari Struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang tersusun telah ditetapkan kepada satu kepala yang mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaannya. Struktur organisasi dan tata kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram dapat dilihat secara rinci seperti gambar di atas. Selanjutnya dapat dari uraian bagan di atas penulis memaparkan tugas dan fungsi masing-masing anggota KPU Kota Mataram sesuai divisinya dan terbagi dalam 5 divisi. Berikut tabel tugas dan fungsi KPU Kota Mataram:

2.3.2. Tugas dan Fungsi KPU Kota Mataram

Tabel 2.3 Tugas dan Fungsi KPU Kota Mataram

No.	Penamaan Divisi	Pembagian Divisi	Tugas
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Drs. H. M. Ainul Asikin, M.Si <i>(Ketua)</i> Sopan Sopian Hadi, S.E.,M.M. <i>(Wakil Ketua)</i> Sub.Bag. <i>Kepala Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik</i>	1. Administrasi Perkantoran, kerumahtanggaan dan Kearsipan; 2. Protokol dan persidangan; 3. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara; 4. Pelaksanaan, Pertanggungjawab an dan Pelaporan Keuangan 5. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji; 6. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta distribusi logistik Pemilu
2.	Divisi Teknis Penyelenggaraan	Bedi Saparwadi, S.E. <i>(Ketua)</i> Paizah, S.Ag.,M.Sy. <i>(Wakil Ketua)</i> Sub.Bag. <i>Kepala Sub.Bag. Teknis Pemilu & Hubungan Partisipasi Masyarakat</i>	1. Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi; 2. Verifikasi Partai Politik dan DPD; 3. Pencalonan peserta Pemilu; 4. Pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan suara; 5. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil-hasil Pemilu dan Pemilihan; 6. Pelaporan Dana Kampanye;

			7. PAW Anggota DPRD;
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih,Partisipasi Masyarakat dan SDM	Eka Sugih Gunawan, S.Kom. <i>(Ketua)</i> Drs. H. M. Ainul Asikin, M.Si <i>(Wakil Ketua)</i> Sub.Bag. Sub. Bag. <i>Kepala Sub. Bag. Teknis Pemilu & Hubungan Partisipasi Masyarakat</i> <i>Kepala Sub.Bag. Keuangan, Umum & Logistik</i> Sub.Bag.	1. Sosialisasi KePemiluan; 2. Partisipasi masyarakat dan pendidikan Pemilih; 3. Publikasi dan Kehumasan; 4. Kampanye Pemilu dan Pemilihan; 5. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi; 6. Kerja sama Antar Lembaga; 7. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kab/Kota; 8. Rekrutmen Badan Adhoc; 9. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM; 10. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi; 11. Diklat dan Pengembangan SDM; 12. Penelitian dan Pengembangan KePemiluan; 13. Pengelolaan dan Pembinaan SDM;
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Sopan Sopian Hadi, S.E.,M.M. <i>(Ketua)</i>	1. Penyusunan Program dan Anggaran;

		<p>Bedi Saparwadi, S.E. <i>(Wakil Ketua)</i></p> <p>Sub.Bag. <i>Kepala Sub.Bag. Program dan Data</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian KePemiluan; 3. Monitoring, Evaluasi, Pengendalian Program dan Anggaran; 4. Pemutahiran dan Pemeliharaan data Pemilih; 5. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu; 6. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT; 7. Pegelolaan Informasi; 8. Pengelolaan da Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional; 9. Pengelolaan dan Penyeiaan Informasi Publik (PPID);
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	<p>Paizah, S.Ag.,M.Sy. <i>(Ketua)</i></p> <p>Eka Sugih Gunawan, S.Kom. <i>(Wakil Ketua)</i></p> <p><i>Kepala Sub. Bag. Hukum</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Rancangan Keputusan; 2. Telaah dan Advokasi Hukum; 3. Dokumentasi dan Publikasi Hukum; 4. Pengawasan dan Pengendalian Internal; 5. Penyelesaian Pelanggaran, Administrasi dan Etik;

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram 2018

2.3.3. Program Kerja Komisi Pemilihan Umum

Tabel 2.4 Program Kerja Komisi Pemilihan Umum

NO	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Peleaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan setjen KPU	Meningkatnya Pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
			Petunjuk pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
			Jumlah juklas/juknis pengelolaan keuangan di lingkungan KPU
		Terselesaikan permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Jumlah KPU Provinsi dan Kab/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu valid
2	Fasilitas Fasilitas pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemelihara dan invesntariasi Logistik Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat satker dalam mengelola logistik Pemilu	Persentase pola pengelolaan logistik Pemilu ditingkat satker
		Terlaksananya pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu	Persentase pelembagaan SOP pengelolaan logistik Pemilu
		Tersusunnya standar logistik Pemilu	Persentase penyusunan standar logistik Pemilu
		Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik	Persentase penyusunan administrasi pengelolaan logistic
		Terseainya data kebutuhan logistic Pemilu yang akurat	Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik Pemilu

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram

Sarana dan Prasarana

Dalam mendukung pelaksanaan tugas aparaturnya KPU, dengan sasaran program (outcome) yang akan dicapai adapun indikator kinerja programnya adalah: presentase dukungan sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik. Sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada semua masyarakat.

2.4. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram yang biasa disebut Lapas Mataram merupakan bangunan penjara peninggalan Colonial Belanda dan didirikan pada tahun 1936. Seiring dengan perubahan sistem perlakuan dalam pelanggaran hukum di Indonesia maka begitupun nama penjara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan. Luas bangunan kurang lebih 5.706 m² dan telah beberapa kali mengalami perubahan. Lapas Mataram terletak strategis ditengah Kota yang berlokasi di Jalan HOS Cokroaminoto No. 5 Mataram dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara : Rumah Sakit Angkatan Darat
2. Sebelah Selatan : Zoya Collection
3. Sebelah Timur : Kantor Gubernur Provinsi NTB
4. Sebelah Barat : Rumah Penduduk.
5. Luas Tanah : 5.706 m²
6. Luas Bangunan : 3.112 m²

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram bersebrangan dengan Kantor Gubernur NTB yang berjarak sekitar 10 m, kemudian berdekatan dengan Kabtor Walikota Mataram sekitar 20 m, dengan kantor Kejaksaan Negeri Mataram dan Kejaksaan Tinggi Mataram sekitar 5 Km, kemudian dengan kantor Pengadilan

Negeri Mataram, Kantor Kepolisian Daerah NTB, Kantor Kepolisian Resort (Polrest) Mataram 6 Km, dengan Rumah Sakit Provinsi NTB sekitar 7 Km. Bangunan Lapas Kelas II A Mataram meliputi halaman depan selanjutnya bangunan kantor, bangunan blok Narapidana dan Tahanan pria bangunan blok Narapidana dan Tahanan wanita, selanjutnya dilengkapi bangunan masjid, pura, ruang berkunjung bagi sanak saudara yang bersangkutan dengan para Narapidana , Ruang Pendidikan, Bangunan Poliklinik Tower Air dan Bangunan Gudang, Bangunan Blok Narapidana dan Tahanan Pria berbentuk seperti huruf U. Adapun kondisi bangunan Lapas Kota Mataram yang sudah cukup tua sehingga mengalami pembangunan ulang mulai dari 2002 hingga terakhir selesai rehap pada tahun 2012.

Tabel 2.5 Jumlah Narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram

Periode 1 Juni Hingga 30 Juni 2018

NO	PERIODE	NARAPIDANA						TOTAL
		DL	DP	TD	AL	AP	TA	
1	1 JUN 2018	509	0	509	0	0	0	509
2	2 JUN 2018	608	44	652	0	0	0	652
3	3 JUN 2018	608	0	608	0	0	0	608
4	4 JUN 2018	607	0	607	0	0	0	607
5	5 JUN 2018	609	0	609	0	0	0	609
6	6 JUN 2018	609	0	609	0	0	0	609
7	7 JUN 2018	612	0	612	0	0	0	612
8	8 JUN 2018	618	0	618	0	0	0	618
9	9 JUN 2018	621	0	621	0	0	0	621
10	10 JUN 2018	620	0	620	0	0	0	620
11	11 JUN 2018	619	0	619	0	0	0	619
12	12 JUN 2018	619	0	619	0	0	0	619
13	13 JUN 2018	619	0	619	0	0	0	619
14	14 JUN 2018	365	0	365	0	0	0	365
15	15 JUN 2018	634	0	634	0	0	0	634
16	16 JUN 2018	631	0	631	0	0	0	631
17	17 JUN 2018	631	0	631	0	0	0	631
18	18 JUN 2018	360	0	360	0	0	0	360
19	19 JUN 2018	627	0	627	0	0	0	627
20	20 JUN 2018	627	0	627	0	0	0	627
21	21 JUN 2018	625	0	625	0	0	0	625
22	22 JUN 2018	624	0	624	0	0	0	624
23	23 JUN 2018	621	0	621	0	0	0	621
24	24 JUN 2018	620	0	620	0	0	0	620
25	25 JUN 2018	620	0	620	0	0	0	620
26	26 JUN 2018	621	0	621	0	0	0	621
27	27 JUN 2018	616	0	616	0	0	0	616
28	28 JUN 2018	614	0	614	0	0	0	614
29	29 JUN 2018	613	0	613	0	0	0	613
30	30 JUN 2018	611	0	611	0	0	0	611

Sumber: Laporan UPT Lapas Mataram tahun 2018

NDP : Napi Dewasa Perempuan

NAP : Napi Anak Perempuan

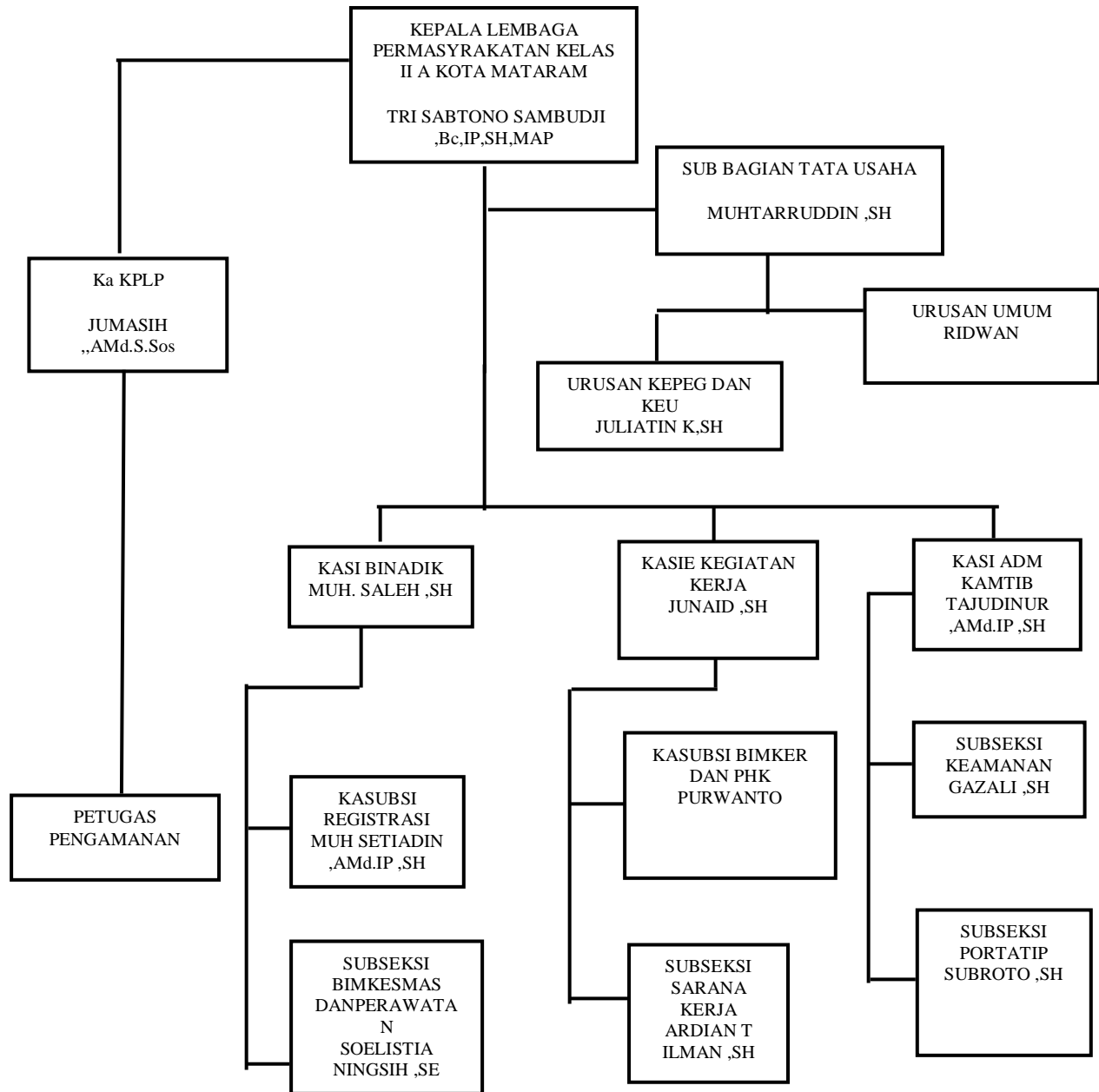
NDL : Napi Dewasa Laki-Laki

NAL : Napi anak Laki-Laki

Dapat dilihat dari tabel jumlah Narapidana di atas setiap harinya mengalami perubahan yang tidak bisa ditebak. Hal ini disebabkan setiap hari ada saja Narapidana yang masuk dan ada juga Narapidana yang telah bebas karena masa hukumannya telah berakhir. Kemudian menyebabkan terhambatnya beberapa program yang akan dijalankan karena jumlah penghuni Lapas tidak bisa stabil dalam waktu sebulan pasti akan selalu ada perubahan.

2.4.1. Struktur Organisasi Lapas Kelas II Kota Mataram

Bagan 2.2 Bagan Struktur Organisasi Lapas Kelas II Kota Mataram



Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram 2018

Struktur organisasi Lapas Kelas II A Kota Mataram menjelaskan bahwa adanya pekerjaan yang tersusun dan telah ditetapkan kepada satu kepala yang memimpin serta mempunyai beberapa anggota dalam pelaksanaan tugas. Struktur organisasi dan tata kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram dapat dilihat secara rinci seperti gambar di atas.

Disini penulis hanya akan memaparkan tentang tugas pokok dan fungsi dari unit kerja seksi pelayanan tahanan. Unit kerja seksi pelayanan tahanan adalah salah satu unit kerja di Lembaga Pemasyarakatan yang langsung bersinggungan dengan pemenuhan hak politik Narapidana dalam memberikan hak suara pada pemilihan gubernur Kota Mataram tahun 2018. Unit kerja ini terdiri dari tiga sub seksi diantaranya sub seksi registrasi dan bimbingan kemasyarakatan yang salahsatunya tugas pokoknya melakukan pendataan tahanan dan Narapidana kedalam buku register dan memasukanya kedalam data komputerisasi, subseksi bimbingan permasyarakatan yang memberikan bimbingan dan penyuluhan serta kegiatan lainnya kepada seluruh Narapidana yang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram.

Kepala Seksi Bagian Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram, Bapak MUH SETIADIN ,AMd.IP ,SH menyatakan bahwa saat juni 2018 jumlah Narapidana yang ada di Lapas sebanyak 930 orang diantaranya 314 orang sebagai tahanan dan 616 orang sebagai Narapidanan. Semua jumlah penghuni Lapas didominasi oleh laki-laki dari data yang didapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Narapidana yang memberikan hak suaranya pada

Pemilihan Gubernur tahun 2018 sebanyak 241 orang dari data yang didapat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Adapun jumlah Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram per tahun Juni 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Jumlah Narapidana dan Tahanan di Lapas Kota Mataram Juni 2018

NO	Narapidana dan Tahanan	2018	
		Laki-laki	Perempuan
1	Narapidana Dewasa	616	-
2	Narapidana Anak	-	-
3	Tahanan Dewasa	314	-
4	Tahanan anak	-	-

Sumber : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram pada Pilgub NTB 2018 kemarin sebanyak 930 orang namun dari data yang didapatkan oleh penulis hanya 241 orang saja yang dapat memilih dan masuk sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari jumlah keseluruhan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kota Mataram. Hal ini terjadi karena KPU Kota Mataram kesulitan dalam menemukan NIK para Narapidana sehingga menyebabkan jumlah DPT sedikit.